



Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Belanja Langsung Dengan Variabel Pemoderasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung

Ayu Septiawati¹, Yuliana Sari², Sopiyan A.R³, Periansya^{4*}

¹²³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

*Email : periansya@polsri.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.620>

Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen

Info Artikel

Diterima :
2021-06-28

Diperbaiki :
2021-10-12

Disetujui :
2021-10-13

ABSTRAK

Otonomi daerah mendorong tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendanai Belanja Langsung agar tercapainya standar pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Tujuan penelitian ini guna membuktikan pengaruh pemoderasi PAD, DAU, DAK dan PDRB terhadap Belanja Langsung. Metode pengujian penelitian menggunakan teknik analisis regresi moderasi (MRA) melalui uji interaksi dengan sampel penelitian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di 15 Kabupaten/Kota periode 2016-2020. Hasil pengujian bahwa PAD, DAK, dan PDRB menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara parsial, sedangkan DAU sebaliknya atas Belanja Langsung. PAD, DAU, DAK, dan PDRB memiliki pengaruh simultan dengan signifikansi sebesar 71,1%. Hasil uji moderasi bahwa PDRB secara parsial tidak dapat memoderasi sedangkan secara bersamaan dipengaruhi variabel moderating memiliki pengaruh simultan dengan signifikansi sebesar 72,8%. Kesimpulan dari penelitian ini diperlukannya faktor moderasi untuk meningkatkan Belanja Langsung selain itu pemerintah daerah agar kedepannya melibatkan pihak swasta dalam menggali potensi penerimaan daerah yang lebih optimal.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, PDRB, Belanja Langsung

ABSTRACT

Autonomy encourages the level of regional financial independence in funding Direct Expenditures in order to achieve public service standards and equitable development. The goal of this research to prove the moderating effect of PAD, DAU, DAK and GRDP on direct spending. The research testing method uses a moderation regression analysis (MRA) technique through interaction tests with research samples in the Regional Government Financial Reports in 15 Regencies/Cities for the 2016-2020 periods. The test results show that PAD, DAK, and GRDP have a positive and partially significant effect, while DAU on the contrary has direct expenditure. PAD, DAU, DAK, and GRDP have a simultaneous effect with a significance of 71.1%. The results of the moderation test show that the GRDP partially cannot moderate while simultaneously being influenced by the moderating variable has a simultaneous effect with a significance of 72.8%. The conclusion this research there is a need for a moderating factor to increase Direct Expenditures in addition to local government so that in the future it will involve the private sector in exploring the potential for more optimal regional revenues.

Keywords: PAD, DAU, DAK, GRDP, Direct Expenditures

Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 55431

1. PENDAHULUAN

Dampak positif dari reformasi di Indonesia menimbulkan perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya tersentralisasi bergeser menjadi sistem desentralisasi. Bergesernya perubahan sistem pemerintahan mendorong masyarakat ikut andil dalam mengambil peranan dalam proses pengawasan dan penggunaan sumber penerimaan negara di masing-masing daerah yang mampu mendukung terciptanya pembaruan pada proses tata kelola pemerintahan di Indonesia sehingga mampu mendorong terciptanya suatu perubahan yang baru dalam sistem otonomi daerah seperti terbitnya regulasi peraturan terkait pada pemerintah daerah.

Otonomi daerah ditujukan untuk mendorong penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat di dalam mengelola serta menggali potensi di daerahnya masing-masing. Dengan diterapkannya otonomi daerah di dalam pengelolaan kekayaan dan pengeluaran belanja daerah yang mempertimbangkan kesanggupan kondisi keuangan daerah masing-masing dalam memenuhi fungsi otonomi. Indonesia yang mempunyai letak geografis strategis mempunyai kekayaan alam sangat besar terkandung di dalamnya, kondisi keberadaan letak Indonesia mempengaruhi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan (Fathia & Rusdi, 2020). Timbulnya kesenjangan antar daerah, di satu sisi ada daerah memiliki keberuntungan atas kekayaan potensial yang dimiliki dilain sisi ada yang kurang mempunyai sumber daya.

Ketidakmerataan baik sumber daya maupun keuangan tiap daerah di Indonesia mendorong pemerintah pusat mengambil peran dalam rangka mengurangi kesenjangan yang terjadi dan tercapainya standar pelayanan publik pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tingginya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah atas pelaksanaan desentralisasi fiskal umumnya banyak ditemukan di beberapa Negara khususnya Negara berkembang (Halim, 2017).

PDRB perkapita merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional (Ayem, Sri & Pratama, 2018). Meningkatnya *PDRB* perkapita daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah ditinjau dari tingkat penerimaan daerah dengan wujud produksi barang dan jasa yang diperoleh dalam satu tahun anggaran. Penerimaan daerah memberikan kontribusi pada tingkat signifikannya *PDRB* di pemerintah daerah kabupaten/kota pada Provinsi Lampung seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Provinsi Lampung dengan dengan 15 Kabupaten dan 2 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran yang berbeda antar tiap daerah. Agar dapat tercapainya standar pelayanan publik pemerintah melalui pemenuhan kebutuhan daerah dalam satu tahun anggaran, maka harus sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah diatur oleh peraturan daerah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran daerah. Berikut rekapitulasi besarnya anggaran dan penyerapan Belanja Langsung Pemerintah Lampung tahun anggaran 2016-2020 terlihat di bawah ini:

Tabel 1 Penyerapan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2016	1.562.669.417.668	1.436.329.766.696	91,92%
2017	1.864.267.134.161	1.774.161.217.661	95,17%
2018	2.194.289.756.355	1.741.100.261.661	79,35%
2019	2.360.534.067.439	2.067.764.253.415	87,60%
2020	2.791.154.198.780	1.890.780.319.472	67,74%

Sumber : Portal Data DJPK diolah peneliti, 2021

Dari Tabel 1 ditemukan persentase penyerapan anggaran Belanja Langsung selama 5 tahun belakangan belum semuanya terealisasi hingga mencapai target anggaran 100%, walaupun terjadi peningkatan anggaran alokasi Belanja Langsung per tahun anggaran namun tidak diikuti dengan meningkatnya penyerapan anggarannya. Penelitian (Gunantara & Dwirandra, 2014) menunjukkan Belanja Modal tidak mampu memoderasi dana alokasi umum atas perkembangan Ekonomi. Kemudian penelitian (Adyatma & Oktaviani, 2015) menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi PAD dan DAU. Dengan fenomena ini dan masih minimnya kegiatan penelitian mengenai topik penelitian ini di wilayah Provinsi Lampung, maka peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian ini guna melihat apakah terdapat Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Belanja Langsung Dengan Variabel Pemoderasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung dengan harapan dapat menjadi sumbang saran bagi pemerintah maupun peneliti lainnya..

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan (Jensen dan Meckling, 1976), teori keagenan menjelaskan mengenai kesepakatan yang dibuat serta disepakati oleh pihak yang terlibat seperti pihak agen dan pihak prinsipal. Keterkaitan antara pihak agen dan pihak prinsipal di suatu entitas yaitu ketika manajemen bertindak selaku pihak agen dan investor bertindak selaku pihak prinsipal (Pamuji & Abdillah, 2014). Penelitian yang dihasilkan oleh Zelmiyanti (2016) mengatakan bahwa pemerintah daerah bertindak selaku pihak agen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

2.2. Teori Regulasi (*Regulation Theory*)

Menurut (Stigler, 1971) dan (Baldwin, 2012) yang menyatakan bahwa teori regulasi merupakan suatu pedoman pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang diidentifikasi dan diskrit. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Bastian, 2017) regulasi merupakan pendekatan aturan secara tertulis yang harus diterapkan pada pengelolaan sebuah organisasi untuk dapat mencapai masyarakat yang sejahtera.

2.3. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Menurut (Edward, 1984) menjelaskan bahwa teori stakeholder membahas mengenai kepada pihak mana saja perusahaan harus bertanggung jawab. Pada penelitian (Fatimah dkk,

2019), menyatakan bahwa stakeholder merupakan keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan dengan kepemilikan kuasa atas tahapan pengambilan keputusan dapat berpengaruh pada tahapan pengelolaan potensi ekonomi yang lebih maksimal.

2.4 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

UU No.32 Tahun 2004 menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah atas pengelolaan sendiri oleh pemerintah daerah guna mendanai kebutuhan daerah atas pelaksanaan pelayanan publik yang pelaksanaannya ada pada peraturan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah penerimaan yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang didistribusikan untuk keuangan daerah. Dana Transfer ini bertujuan untuk bisa memitigasi terjadinya kesenjangan keuangan fiskal sehingga dapat terselenggaranya pemerataan kondisi tingkat kesanggupan keuangan antar daerah dalam pembiayaan belanja daerah terkait dengan pelaksanaan asas desentralisasi (Peraturan Pemerintah No.58, 2005).

Selanjutnya UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan penerimaan pendapatan dari APBN berupa transfer yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah wilayah tertentu. DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu terkait kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan nasional.

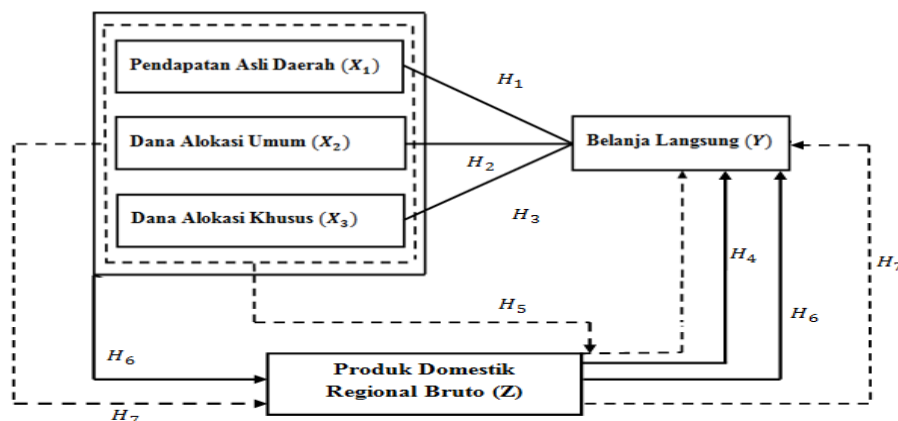
2.5. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut (BPS, 2021) PDRB adalah komponen penerimaan daerah yang digambarkan pada *PDRB* untuk skala Provinsi. PDRB digunakan sebagai alat untuk melihat perkembangan kondisi suatu daerah atas kontribusi apa saja yang diberikan oleh sumber penyokong penerimaan daerah pada satu periode anggaran.

2.6. Belanja Langsung Daerah

UU No.23 Tahun 2014 menguraikan bahwa Belanja Langsung Daerah adalah semua yang menjadi tanggungan daerah sebagai pengurang penerimaan daerah pada satu tahun anggaran. Belanja Langsung mencakup Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang Jasa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data yang diolah peneliti (2021)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan

- : Pengaruh variabel secara parsial
- - - - - : Pengaruh variabel secara simultan
X : Variabel Bebas,
Y : Variabel Terikat
Z : Variabel Pemoderasi

Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian yang diajukan dengan mengacu pada kerangka pemikiran serta permasalahan yang ada :

- H_1 : Diduga secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.
 H_2 : Diduga secara parsial dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.
 H_3 : Diduga secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung
 H_4 : Diduga secara parsial *produk domestik regional bruto* berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.
 H_5 : Diduga secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan *produk domestik regional bruto* berpengaruh positif dan signifikan secara bersamaan terhadap belanja langsung.
 H_6 : Diduga secara parsial *produk domestik regional bruto* dapat memoderasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja langsung
 H_7 : Diduga secara simultan *produk domestik regional bruto* dapat memoderasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja langsung.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil data sekunder dari laporan keuangan 15 kabupaten di provinsi Lampung. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) dan *Produk Domestik Regional Bruto* (X_4) berperan sebagai pemoderasi melalui Belanja Langsung (Y). Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pengujian hipotesis dengan koefisien determinasi (R^2), analisis regresi dengan variabel moderating menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA), uji simultan (F) dan uji parsial (t). Kemudian data diolah dan di analisis dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS 25.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan kelompok yang mempunyai kesamaan atau kemiripan pada karakteristik dan klasifikasi tertentu dijadikan sebagai suatu objek atau benda yang menjadi target dalam penelitian (Yahya, 2019). Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berasal dari 13 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung tahun dari 2016 sampai 2020. Sedangkan Sampel ialah anggota unit yang mewakili

karakter dari populasi (Yahya, 2019). Teknik pemilihan pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah suatu pendekatan penentuan sampel dimana semua bagian dari populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2016). jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 15 kabupaten/kota dikali dengan priode 5 tahun terakhir sehingga data berjumlah 75 data, kemudian data diolah menggunakan pendekatan outlier menjadi 68 data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Tanpa Pemoderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,853 ^a	,728	,711	79200032005,31187

a. Predictors: (Constant), PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

Sumber: Output SPSS IBM 25, 2021

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dihasilkan bahwa nilai adjusted R^2 senilai 0,711 atau 71,1% keterkaitan antara variabel bebas secara bersama-sama dengan selisih nilai 28,9 % yang disebabkan oleh variabel lain yang belum diteliti..

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Dengan Pemoderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,870 ^a	,756	,728	76821823927,76804

a. Predictors: (Constant), Moderasi3, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Moderasi1, Produk Domestik Regional Bruto, Moderasi2

Sumber: Output SPSS IBM 25, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diatas nilai adjusted R^2 senilai 0,728 atau 72,8% keterkaitan yang terjadi terhadap variabel bebas secara bersama-sama dipengaruhi oleh moderasi variabel moderating dan memiliki selisih senilai 27,2 % disebabkan oleh variabel lain yang belum diteliti.

Sesuai dengan perhitungan Tabel 2 dan Tabel 3 atas pengujian koefisien determinasi (R^2) diketahui jika dilihat dari besaran nilai R^2 hasil uji koefisien daterminasi dengan variabel moderating dan tanpa variabel moderating yang disandingkan diperoleh hasil uji dengan

variabel moderasi dengan nilai sebesar 71,1 % lebih tinggi dengan hasil uji tanpa variabel moderasi senilai 72,8%.

4.1.2 Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Pendekatan pengujian analisis data ini memiliki persamaan regresi seperti berikut ini:

a) *Moderated Regression Analysis (MRA) tanpa pemoderasi*

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Tanpa Pemoderasi

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	31356658	44452861		7,054	,000
		1088,870	367,838			
	Pendapatan Asli Daerah	1,225	,253	,443	4,843	,000
	Dana Alokasi Umum	-,221	,115	-,403	-	,059
					1,921	
	Dana Alokasi Khusus	,845	,189	,468	4,475	,000
	PDRB	,007	,002	,548	2,999	,004

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber: Output SPSS IBM 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji analisis regresi moderasi diperoleh persamaan regresi berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z_1 + e \quad (1)$$

$$Y = 313.566.581.088,870 + 1,225 \text{ PAD} - 0,221 \text{ DAU} + 0,845 \text{ DAK} + 0,07 \text{ PDRB} \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan analisis regresi yang dihasilkan moderasi tersebut diperoleh jika;

- 1) Nilai konstanta (α) senilai 313.566.581.088,870 menunjukkan bahwa ketika variabel independen pada kondisi konstan, variabel dependen tidak akan mengalami perubahan kenaikan ataupun penurunan nilai.
- 2) Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah senilai 1,225 menunjukkan bahwa ketika pada kondisi adanya kenaikan dalam satu satuan akan menyebabkan kenaikan pada Belanja Langsung sebesar kuantitas kenaikan tersebut dengan catatan variabel lain bernilai nol.
- 3) Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum senilai -0,221 menunjukkan bahwa ketika pada kondisi adanya penurunan dalam satu satuan akan menyebabkan penurunan pada Belanja Langsung sebesar kuantitas penurunan tersebut dengan catatan variabel lain bernilai nol.
- 4) Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus senilai 0,845 menunjukkan bahwa ketika pada kondisi adanya kenaikan dalam satu satuan akan menyebabkan kenaikan pada Belanja Langsung sebesar kuantitas kenaikan tersebut dengan catatan variabel lain bernilai nol.

- 5) Nilai koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto senilai 0,07 menunjukkan bahwa ketika pada kondisi adanya kenaikan dalam satu satuan akan menyebabkan kenaikan pada Belanja Langsung sebesar kuantitas kenaikan tersebut dengan catatan variabel lain bernilai nol.

b) Moderated Regression Analysis (MRA) dengan Pemoderasi

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Dengan Pemoderasi

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	286763829893,357	51803623999,088		5,536	,000
	Pendapatan Asli Daerah	,925	,370	,334	2,496	,015
	Dana Alokasi Umum	-,333	,158	-,608	-2,104	,040
	Dana Alokasi Khusus	1,387	,333	,769	4,168	,000
	PDRB	,009	,006	,716	1,603	,114
	Moderasi1	2,285	,000	,334	,676	,502
	Moderasi2	5,060	,000	,543	,509	,613
	Moderasi3	-3,236	,000	-1,002	-1,465	,148

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber: Output SPSS IBM 25, 2021

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji analisis regresi moderasi diperoleh persamaan regresi berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z_4 + \beta_5 X_1 Z_1 + \beta_6 X_2 Z_1 + \beta_7 X_3 Z_1 + e \quad (3)$$

$$Y = 286.763.829.893,357 + 0,925 PAD - 0,333 DAU + 1,387 DAK + 0,009 PDRB + 2,285 PAD * PDRB + 5,060 DAU * PDRB - 3,236 DAK * PDRB \quad (4)$$

- Berdasarkan persamaan analisis regresi yang dihasilkan moderasi tersebut diperoleh jika;
- 1) Nilai konstanta (α) senilai 286.763.829.893,357 yang menunjukkan bahwa ketika variabel independen pada kondisi konstan, variabel dependen tidak akan mengalami perubahan kenaikan ataupun penurunan nilai.
 - 2) Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah senilai 0,925 menunjukkan bahwa ketika pada kondisi adanya kenaikan dalam satu satuan akan menyebabkan kenaikan pada Belanja Langsung sebesar kuantitas kenaikan tersebut dengan catatan variabel lain bernilai nol.
 - 3) Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum senilai -0,333 menunjukkan bahwa ketika pada kondisi adanya penurunan dalam satu satuan akan menyebabkan penurunan pada Belanja Langsung sebesar kuantitas penurunan tersebut dengan catatan variabel lain bernilai nol.

- 4) Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus senilai 1,387 menunjukkan bahwa ketika pada kondisi adanya kenaikan dalam satu satuan akan menyebabkan kenaikan pada Belanja Langsung sebesar kuantitas kenaikan tersebut dengan catatan variabel lain bernilai nol.
- 5) Nilai koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto senilai 0,009 menunjukkan bahwa ketika pada kondisi adanya kenaikan dalam satu satuan akan menyebabkan kenaikan pada Belanja Langsung sebesar kuantitas kenaikan tersebut dengan catatan variabel lain bernilai nol.
- 6) Nilai koefisien regresi moderasi antara PAD*PDRB senilai 2,285 yang artinya efektifitas interaksi moderasi yang dikontribusikan yaitu positif dan berbanding lurus.
- 7) Nilai koefisien regresi moderasi antara DAU*PDRB senilai 5,060 yang artinya efektifitas interaksi moderasi yang dikontribusikan yaitu positif dan berbanding lurus.
- 8) Nilai koefisien regresi moderasi antara DAK*PDRB senilai -3,236 yang artinya efektifitas interaksi moderasi yang dikontribusikan yaitu negatif dan berbanding terbalik.

4.1.3 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan) Tanpa Pemoderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1058936217521950100000000,000	4	264734054380487540000000,000	42,205	,000 ^b
	Residual	395176639387472800000000,000	63	6272645069642426000000,000		
	Total	1454112856909423000000000,000	67			

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

b. Predictors: (Constant), Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

Sumber: Output SPSS IBM 25, 2021

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai F hitung 42,205 tidak kurang dari F tabel 2,52 dan signifikansi 0,000 tidak lebih dari signifikansi alpha (α) 0,05 yang menjelaskan bahwa adanya keterkaitan variabel independen secara bersamaan pada Belanja Langsung.

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan) Dengan Pemoderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1100017299014083300000000,000	7	157145328430583320000000,000	26,62	,000 ^b
	Residual	354095557895339600000000,000	60	5901592631588994000000,000	0,8	
	Total	1454112856909423000000000,000	67			

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

b. Predictors: (Constant), Moderasi3, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Moderasi1, Produk Domestik Regional Bruto, Moderasi2

Sumber: Output SPSS IBM 25, 2021

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai F hitung 26,628 tidak kurang dari F tabel 2,17 dan signifikansi 0,000 tidak lebih dari signifikansi alpha (α) 0,05 yang menjelaskan bahwa adanya keterkaitan variabel independen secara bersamaan pada Belanja Langsung yang melibatkan pemoderasi.

4.1.4 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Parsial Tanpa Pemoderasi

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	313566581088,87	44452861367,838		7,054	,000
		0				
	Pendapatan Asli Daerah	1,225	,253	,443	4,843	,000
	Dana Alokasi Umum	-,221	,115	-,403	-	,059
					1,921	
	Dana Alokasi Khusus	,845	,189	,468	4,475	,000
	PDRB	,007	,002	,548	2,999	,004

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber: Output SPSS IBM 25, 2021

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji hipotesis pengaruh parsial dengan tanpa variabel moderating tersebut sebagai berikut :

- 1) Hasil uji H_1 diketahui nilai signifikan tabel tidak lebih dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 dan nilai t hitung 4,843 tidak kurang dari nilai t tabel 1,66757 yang menjelaskan bahwa adanya keterkaitan secara signifikan parsial dan positif.
- 2) Hasil uji H_2 diketahui nilai signifikan tabel tidak kurang dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 dan nilai t hitung -1,921 tidak lebih dari nilai t tabel 1,66757 yang menjelaskan bahwa adanya keterkaitan secara tidak signifikan parsial dan negatif.
- 3) Hasil uji H_3 diketahui nilai signifikan tabel tidak lebih dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 dan nilai t hitung 4,475 tidak kurang dari nilai t tabel 1,66757 yang menjelaskan bahwa adanya keterkaitan secara signifikan parsial dan positif.
- 4) Hasil uji H_4 diketahui nilai signifikan tabel tidak lebih dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 dan nilai t hitung 2,999 tidak kurang dari nilai t tabel 1,66757 yang menjelaskan bahwa adanya keterkaitan secara signifikan parsial dan positif.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Parsial Dengan Variabel Pemoderasi

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	286763829893,3 57	51803623999,088	5,536	,000
	Pendapatan Asli Daerah	,925	,370	,334	2,496 ,015
	Dana Alokasi Umum	-,333	,158	-,608	- ,040
	Dana Alokasi Khusus	1,387	,333	,769	4,168 ,000
	PDRB	,009	,006	,716	1,603 ,114
	Moderasi1	2,285	,000	,334	,676 ,502
	Moderasi2	5,060	,000	,543	,509 ,613
	Moderasi3	-3,236	,000	-1,002	- ,148
					1,465

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber: Output SPSS IBM 25, 2021

Berdasarkan Tabel 9 hasil uji hipotesis pengaruh parsial yang dimoderasi oleh variabel moderating diketahui nilai t tabel senilai 1,66757 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji moderasi antara PAD*PDRB memiliki nilai signifikansi senilai 0,502 diatas nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 dan nilai t hitung senilai 0,676 kurang dari nilai t tabel senilai 1,66757 yang menjelaskan bahwa tidak mampu memoderasi secara parsial.
- 2) Hasil uji moderasi antara DAU*PDRB memiliki nilai signifikan senilai 0,613 lebih dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 dan nilai t hitung senilai 0,509 kurang dari nilai t tabel senilai 1,66757 yang menjelaskan bahwa tidak mampu memoderasi secara parsial.
- 3) Hasil uji moderasi antara DAK*PDRB memiliki nilai signifikansi senilai 0,148 lebih dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 dan nilai t hitung senilai -1,465 kurang dari nilai t tabel senilai 1,66757 yang menjelaskan bahwa tidak mampu memoderasi secara parsial.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Langsung

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah senilai 0,000 kurang dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05, nilai t hitung senilai 4,843 lebih besar dari nilai t tabel senilai 1,66757 dan memiliki nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah senilai 1,225 yang menunjukkan jika H_0 tidak diterima dan H_1 diterima. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Husen, 2014) dan (Solichah, 2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap Belanja Langsung. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk mendanai kebutuhan daerah atas pelaksanaan pelayanan publik. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Langsung sesuai hasil analisis persamaan regresi moderasi adalah berbanding lurus, ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada kontribusi penerimaan daerah maka akan mendorong pada

meningkatnya pula Belanja Langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

4.2.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Langsung

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum senilai 0,059 lebih dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05, nilai t hitung senilai -1,921 kurang dari nilai t tabel senilai 1,66757 dan memiliki nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum senilai -0,221 yang menunjukkan jika H_0 diterima dan H_2 tidak diterima. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif Dana Alokasi Umum yang tidak signifikan secara parsial terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Hairiyah, 2018), dan (Mustanda, 2020) menyatakan terdapat pengaruh yang tidak signifikan dan negatif secara parsial terhadap Belanja Modal. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Husen, 2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Langsung. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu jenis dana transfer pemerintah pusat yang berasal dari APBN kepada pemerintah daerah ditujukan agar terlaksananya program dan kegiatan pemerintah dalam melakukan pemerataan keuangan antar daerah di Indonesia untuk dapat membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, yang mana hal ini sejalan dengan *grand theory* tentang *agency theory* yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Langsung sesuai hasil persamaan analisis regresi moderasi memiliki hubungan yang berbanding terbalik, ketika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan pada kontribusi penerimaan daerah maka tingkat pengeluaran Belanja Langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung tidak diikuti dengan peningkatan.

4.2.3 Pengaruh DAK terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Khusus senilai 0,000 kurang dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05, nilai t hitung senilai 4,475 lebih besar dari nilai t tabel senilai 1,66757 dan memiliki nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus senilai 0,845 yang menunjukkan jika H_0 tidak diterima dan H_3 diterima. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan positif antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Husen, 2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2019) dan (Maulana, 2020) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu kelompok dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat berasal dari APBN kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional antar daerah yang ada di Indonesia. Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Langsung sesuai hasil persamaan analisis regresi moderasi adalah berbanding lurus, ketika Dana Alokasi Khusus mengalami

peningkatan pada kontribusi penerimaan daerah maka tingkat pengeluaran Belanja Langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung akan diikuti dengan peningkatan juga. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk pelaksanaan pembangunan program nasional melalui pengeluaran Belanja Langsung berupa Belanja Modal, Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai Langsung. Hal ini sesuai dengan konsep teori *stakeholder* pada *grand theory* terkait dengan keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan seperti masyarakat, kondisi lingkungan, investor, dan lain sebagainya yang dijadikan menjadi satu kesatuan kepentingan diwujudkan dalam bentuk anggaran untuk dapat mencapai tujuan bersama dalam ini ialah terlaksananya pembangunan program nasional.

4.2.4 Pengaruh *PDRB* terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui nilai signifikansi variabel *Produk Domestik Regional Bruto* senilai 0,004 kurang dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05, nilai t hitung senilai 2,999 lebih besar dari nilai t tabel senilai 1,66757 dan memiliki nilai koefisien regresi *Produk Domestik Regional Bruto* senilai 0,007 yang menunjukkan jika H_0 tidak diterima dan H_4 diterima. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan positif antara *Produk Domestik Regional Bruto* terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Huda, 2020) menyatakan jika *PDRB* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hartati, 2014) menyatakan bahwa *Produk Domestik Regional Bruto* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan klasifikasi penerimaan dengan harga konstan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2020 digunakan sebagai alat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah Provinsi. Hubungan antara *Produk Domestik Regional Bruto* dengan Belanja Langsung sesuai hasil analisis persamaan regresi moderasi adalah berbanding lurus, ketika *Produk Domestik Regional Bruto* meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat yang dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran pengeluaran Belanja Langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sehingga akan dapat meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan yang diteliti oleh (Fatimah & Yusuf Hasbullah, 2020) menyatakan bahwa *Produk Domestik Regional Bruto* mampu mendorong penerimaan pemerintah daerah dan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah.

4.2.5 Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan *PDRB* secara bersama sama terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) diketahui nilai F hitung Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan *Produk Domestik Regional Bruto* senilai 42,205 lebih besar dari nilai F tabel senilai 2,52 dan memiliki nilai signifikansi senilai 0,000 kurang dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen bersamaan. Sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai adjusted R^2 senilai 0,711 satuan

desimal atau 71,10% satuan persentase yang merepresentasikan jika terdapat pengaruh simultan yang positif sebesar 71,10%. Dimana nilai sisa sebesar 28,90% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti pada penelitian ini. Hasil kegiatan penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan (Hartati, 2014) yang menyatakan bahwa *Produk Domestik Regional Bruto*, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara simultan bersamaan terhadap Belanja Langsung.

4.2.6 Pengaruh variabel pemoderasi atas PDRB

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) dengan variabel moderating yang memoderasi variabel independen dengan nilai signifikansi variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah senilai 0,502, Dana Alokasi Umum senilai 0,613, Dana Alokasi Khusus senilai 0,148, dimana nilai koefisien kesemua variabel independen tersebut lebih dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 dan nilai t thitung variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah senilai 0,676, Dana Alokasi Umum senilai 0,509, Dana Alokasi Khusus senilai -1,465, dimana nilai t hitung semua variabel independen pada penelitian ini kurang dari nilai t tabel senilai 1,66757. Sedangkan berdasarkan hasil analisis regresi moderasi diperoleh jika PAD dan DAU memiliki pengaruh yang positif dan DAK memiliki pengaruh yang negatif dengan melibatkan variabel pemoderasi, yang menunjukkan jika H_0 diterima dan H_6 tidak diterima. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa *PDRB* secara parsial tidak mampu memoderasi variabel PAD, DAU, dan DAK.

4.2.7 Pengaruh variabel pemoderasi secara simultan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) diketahui nilai F hitung PAD, DAU, dan DAK yang dimoderasi oleh *PDRB* senilai 26,628 lebih besar dari nilai F tabel senilai 2,17 dan memiliki nilai signifikansi senilai 0,000 kurang dari nilai signifikansi alpha (α) senilai 0,05 yang mengindikasikan jika terdapat pengaruh simultan dipengaruhi oleh pemoderasi secara bersamaan terhadap Belanja Langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai adjusted R^2 senilai 0,728 satuan desimal atau 72,80% satuan persentase yang merepresentasikan jika terdapat pengaruh simultan dan signifikan sebesar 72,80% yang dipengaruhi oleh variabel moderating terhadap Belanja Langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dimana sisanya senilai 27,2% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti penulis, yang mana sejalan dengan penelitian (Hartati, 2013) yang menyatakan bahwa jika H_0 diterima dan H_7 diterima dimana *PDRB*, DAU, dan PAD memiliki pengaruh secara simultan secara bersamaan. Ketika dibandingkan antara pengujian tanpa melibatkan variabel moderasi dan melibatkan variabel moderasi diperoleh jika terdapat pengaruh simultan yang lebih tinggi sebesar 72,80% dari 71,10% yang artinya diperkuat oleh variabel moderasi sebesar 1,70%.

5 KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan analisis data penelitian dan interpretasinya disimpulkan bahwa diterimanya H_1 , H_3 , H_4 , H_5 , H_7 , dan tidak diterimanya H_2 , H_6 yang

berarti bahwa PAD, DAK, dan *PDRB* berpengaruh positif dan signifikan parsial terhadap Belanja Langsung, sedangkan DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan. PAD, DAU, DAK, dan *PDRB* berpengaruh bersamaan dan signifikan sebesar 71,1% terhadap Belanja Langsung. *PDRB* secara parsial tidak mampu memoderasi PAD, DAU dan DAK, dimana sisanya dipengaruhi faktor lain. sedangkan secara simultan *PDRB* mampu memoderasi PAD, DAU, DAK dan *PDRB* yang dipengaruhi oleh variabel pemoderasi signifikan sebesar 72,8 %. Hasil penelitian ini berarti bahwa pemerintah Provinsi Lampung harus terus mengenali dan menggali potensi sumber penerimaan asli daerah secara optimal agar dapat tercapainya kemandirian keuangan daerah dan agar dapat menggunakan DAU dan DAK sesuai dengan tujuan digunakannya anggaran perihal pemerataan pembangunan keuangan dan pelaksanaan program prioritas nasional.

Peneliti memberikan saran bagi pihak pemerintah daerah agar terus menggali potensi PAD serta menggunakannya secara optimal, memaksimalkan pelayanan publik, mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mendorong kemandirian daerah lebih baik lagi. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya yaitu agar menambahkan sampel penelitian yang lebih luas lagi cakupannya, tahun penelitian terbaru, metode pengujian lainnya dan menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

REFERENSI

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Ayem, Sri; Pratama, D. D. (2018). Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fathia & Rusdi. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 379–396.
- Fatimah dkk. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Fatimah, S., & Yusuf Hasbulllah. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Produk domestik Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 -2019. *EKONOBIS*, 6(2), 1–26.
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*, (March 2018). <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>

- Gunantara & Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali. *Akuntansi Universitas Udayana*, 7(3), 529–546.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. (E. S. Suharsi, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, H. D. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Balikpapan. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 115. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.115-130>
- Huda, S. (2020). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 3(2), 77–87.
- Jensen, Michel C., W. H. M. (1976). Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *The Journal of Financial Economics*, October.
- Pamuji & Abdillah. (2014). Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(2), 149–159.
- Peraturan Pemerintah No.58. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005).
- Stigler, G. J. (1971). The theory regulation of economic. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 122). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004. tentang Otonomi daerah.
- Undang Undang No.23 Tahun 2014. Tetang Pemerintah Daerah.
- Yahya, F. F. D. A. B. A. D. I. (2019). Populasi dan Sampel. In D. F. P. Sallama, Novietha Indra; Suharsi, Ema Sri; Setyaningsih, Yuli; Putri (Ed.), *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi* (1st ed., pp. 95–96). Jakarta: Salemba Empat.